

**PENGARUH BANTUAN *INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)*  
TERHADAP KETAHANAN PANGAN PAKISTAN**

**Oleh : Eldara Ardianti**

*eldaraardianti@gmail.com*

**Pembimbing: Dr. Pazli, S. IP, M.Si**

*Pazliku@gmail.com, pazli@unri.ac.id*

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Panam

Pakanbaru 28293 Telp/fax : 0761-63277

***Abstract***

*Pakistan has applied for a financial loan from an IMF institution backed by deteriorating economic conditions. The IMF approved the request for assistance after going through various discussions and certain considerations. Financial assistance from the IMF is accompanied by the terms of the policies needed for these conditions. One of them is liberalization of the agricultural sector.*

*This research was analyzed using a structuralism perspective and supported by dependency theory and neoliberalism theory within the scope of international political economy studies. The formulation of all arguments, facts, and theoretical frameworks in this research is guided by the method of qualitative explanation. The data collection technique in this study is through literature study. Data is obtained and collected through journals, books, research papers, news articles, official publications, conference papers, and later from internet pages that have been related in this case research.*

*One of the implementations of the liberalization policy by Pakistan was done by removing subsidies. Such as subsidy of agricultural inputs and domestic food prices. Liberalization also requires that the government's role in controlling food supply be reduced. With various factors influencing, the policies taken by Pakistan on the recommendations of the IMF, they have a negative influence on the problem of Pakistan's food security.*

**Keywords: IMF, agricultural liberalization, food security, Pakistan**

## I. Latar belakang

Pakistan merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia selatan. Pakistan memiliki jumlah populasi sebanyak 191.71 juta jiwa yang merupakan terbesar ke enam di dunia (*Pakistan Economic Survey, 2015*). Dari jumlah tersebut 30% diantaranya hidup dibawah garis kemiskinan<sup>1</sup>.

Pakistan menjadi salah satu Negara yang sangat tergantung pada bantuan luar negeri. Berdasarkan laporan dari Mumtaz anwar (2006), Lembaga-lembaga keuangan internasional memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan bantuan kepada Pakistan. Sejak tahun 1960an Pakistan telah menerima banyak bantuan asing untuk pembiayaan pembangunannya. Tahun 2002 Pakistan berada dalam urutan ke dua Negara yang paling sering menerima bantuan dari berbagai *International Development Agency (IDA)*. Di tahun yang sama Pakistan juga merupakan penerima bantuan terbanyak kedua dari *Asian Development Bank (ADB)* setelah India. Sejak periode 1988 Pakistan juga telah menjadi klien tetap dari bantuan IMF, dengan total pinjaman senilai 4.07 Miliar Dolar<sup>2</sup>.

Ketertinggalan Pakistan dengan dana asing, disebabkan oleh masih kurangnya sumber pendapatan

dari dalam negeri. Negara Pakistan sangat bergantung kepada sektor pertanian dimana sektor ini menyumbang 20,88% dari total *GDP* dan menampung 43,5% dari total tenaga kerja<sup>3</sup>. Akan tetapi pertanian Pakistan memiliki berbagai permasalahan domestik yang menyebabkan pengembangannya menjadi sangat lambat. Padahal sebagian besar masyarakat Pakistan sangat bergantung pada pertanian.

Produktifitas pertanian Pakistan masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan seluruh populasi. Hal ini disebabkan karena pertanian Pakistan masih bersifat tradisional, dimana sangat bergantung kepada faktor alam seperti cuaca. Minimnya fasilitas irigasi menyebabkan budidaya pertanian masih sangat tergantung pada curah hujan (Habib, 2009)<sup>4</sup>. Selain itu tidak adanya kebijakan yang baik dari pemerintah juga menjadi salah satu alasan dibalik menurunnya performa pertanian Pakistan.

Pertanian yang tidak stabil berimbas pada lemahnya ketahanan pangan Pakistan. Puncaknya adalah ketika terjadi krisis pangan tahun 2008. Berdasarkan laporan dari *FAO*, tahun 2008 Pakistan masuk kedalam daftar 40 negara yang mengalami krisis pangan, dimana sebanyak 60 juta orang berada dalam kondisi kekurangan pangan<sup>5</sup>. Hal ini

---

<sup>1</sup> TRDP & SC-UK., *Food Price Crisis in District Tharpakar*, <http://www.thardeep.org/thardeep/Publication/PubFiles/26z7r6t87p5nFoodPriceCrisis assesment.pdf>

<sup>2</sup> Mumtaz Anwar, *The Political Economy of International Financial Institution Lending to Pakistan*, *Pakistan Economic and Social Review Journal* Vol.44 no.2, 2006

<sup>3</sup> Emma Hooper, *Pakistan's Food Crisis – Water, Energy, Agriculture & Power : The*

*Conflict Ahead*, Barcelona Center of International Affairs, 2010

<sup>4</sup> Habib ur Rehman, *Food scarcity in Pakistan: Causes, Dynamics and Remedies*, *Journal of Managerial Sciences* Vol.III No. 1, 2009

<sup>5</sup> *FAO/WFP/IFAD Presentation to UNCT, Current Food Crisis and Soaring Prices in Pakistan*, In-Slideshare, <https://www.slideshare.net/aghaimranhami/joint-presentation-food-crisis-in->

dikarenakan terjadinya kenaikan harga komoditas pangan pokok domestik yang disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan minyak di pasar internasional. Selain itu cuaca yang buruk pada saat itu juga menyebabkan produksi pertanian berkurang<sup>6</sup>.

Terjadinya inflasi harga di tambah dengan semakin melemahnya perekonomian menyebabkan Pakistan mengajukan pinjaman kepada IMF. Pada bulan November 2008, Pakistan secara resmi menerima bantuan dari IMF dibawah program *Stand By Arrangement (SBA)* yang berlaku selama kurun waktu 3 tahun. Bantuan ini disertai dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang harus diterapkan sebagai persyaratannya. Salah satu kebijakan itu adalah liberalisasi ekonomi diseluruh sektor, seperti sektor pertanian.

Salah satu kebijakan liberalisasi yang diberlakukan pemerintah Pakistan ketika menerima bantuan dari IMF tahun 2008 yaitu penghapusan subsidi. Baik dari sisi produksi (pertanian) maupun sisi konsumsi (harga). Dari sisi produksi subsidi yang harus dihapus pemerintah Pakistan saat itu adalah subsidi input-input pertanian seperti pupuk dan fasilitas irigasi. Sementara dari sisi konsumsi pemerintah Pakistan diharuskan untuk menghapus subsidi harga pangan agar sesuai dengan harga internasional.

Kebijakan-kebijakan ini mempersulit akses masyarakat terhadap pangan. Masyarakat

Pakistan sangat bergantung kepada subsidi pemerintah, terutama dalam penyediaan pangan murah. Hampir setengah dari populasi Pakistan merupakan kelompok masyarakat miskin yang pendapatannya sangat rendah dan 60% dari pendapatan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Terutama pasca krisis, dengan harga pangan yang melambung tinggi masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain bergantung kepada subsidi Negara. Sementara itu pasca berlakunya kebijakan IMF, subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk pangan terpaksa harus dihapus sebagaimana yang disyaratkan.

Berbagai literatur yang menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi ekonomi yang kerap diberikan IMF dalam setiap program bantuannya memberikan dampak negatif bagi masyarakat di negara berkembang. Khususnya untuk sektor pertanian yang secara umum merupakan sektor andalan masyarakat di negara berkembang, baik sebagai mata pencaharian maupun sebagai sumber utama penyedia pangan.

Dalam tulisan Meertens (2000) dikatakan bahwa kebijakan IMF berupa liberalisasi terutama terhadap sektor pertanian memberikan dampak negatif terhadap ketahanan pangan di negara berkembang (Bienefeld, 1995; Mbonile, 1995; Msambichaka and Naho, 1995, Patterman, 1995)<sup>7</sup>.

---

pakistan-april-08, diakses pada 27 April 2018

<sup>6</sup> Tariq Sarwar Awan, *Pakistan Food Security*, In-Slideshare, <https://www.slideshare.net/tariqsarwarawan/pakistan-food-security>, diakses pada 27 April 2018

<sup>7</sup> Bert Meertens, *Agricultural Performance in Tanzania Under Structural Adjustment Programs : Is It Really So Positive?*, *Agriculture and Human Values* 17: 333–346, 2000

Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian oleh lembaga CASA mengenai dampak kebijakan IMF terhadap ketahanan pangan mencatat bahwa kebijakan penghapusan subsidi untuk modal pertanian seperti penyediaan fasilitas irigasi menjadi penyebab merosotnya jumlah produksi dan berimbas terhadap kenaikan harga dinegara berkembang<sup>8</sup>. (Munachinga, 2006) juga menyatakan bahwa liberalisasi menyebabkan meningkatnya biaya produksi bagi pertanian negara berkembang<sup>9</sup>. Selanjutnya (Tri, 2012) memberikan argument bahwa liberalisasi sektor pertanian juga menyebabkan peran pemerintah terhadap sektor ini melemah karena adanya intervensi kebijakan dari lembaga donor seperti IMF<sup>10</sup>.

Dalam kasus Pakistan, Liberalisasi yang menjadi salah satu penekanan dalam persyaratan batuan IMF menuntut agar komoditas pangan Pakistan harus berjalan sesuai mekanisme pasar. Akibatnya peran pemerintah dalam hal penyediaan pangan harus dikurangi. Padahal sebagai negara dengan populasi padat dan terus bertambah, Pakistan memerlukan mekanisme ketahanan pangan yang baik agar bisa terhindar dari krisis pangan baik secara domestik maupun global.

Mengingat tidak stabilnya produktifitas pertanian, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya pangan yang

dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Intervensi pemerintah dalam hal distribusi dan kebijakan harga yang memadai, menguntungkan dan memuaskan menjadi salah satu faktor penopang ketahanan pangan (Bustanul, 2004)<sup>11</sup>.

Selain itu, dilepasnya komoditas pangan ke mekanisme pasar bebas menyebabkan harga-harga pangan domestik menjadi tidak stabil karena harus disesuaikan dengan harga internasional yang fluktuatif dan cenderung naik. Imbasnya adalah daya beli masyarakat Pakistan terhadap pangan semakin melemah karena kenaikan harga tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Dengan daya beli yang semakin berkurang ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan Pakistan semakin rawan terhadap pangan.

Masuknya bantuan IMF dengan berbagai program kebijakannya, disaat Pakistan mengalami krisis pangan menjadi satu langkah yang tidak tepat. Kehadiran IMF yang tidak mempertimbangkan kondisi di sektor mikro justru membuat ketahanan pangan Pakistan semakin melemah.

## II. Kerangka Teori

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori dependensi (ketergantungan) sebagai pendukung fenomena yang diangkat. Teori ketergantungan menggambarkan bahwa negara-negara berkembang

---

<sup>8</sup> CASA, The Impact of Structural Adjustment Policies on Food Security in The Philippine : A Summary Report

<sup>9</sup> Munachinga C.H. Simatele, *Food Production in Zambia : The Impact of Selected Structural Adjustment Policies*, African Economic Research Consortium, Nairobi, 2006

<sup>10</sup> Tri Andriyanto, *Pengaruh Letter of Intent (LoI) IMF Terhadap Pelemahan Ketahanan Pangan Beras Indonesia 1995-2009*, Universitas Indonesia, 2012

<sup>11</sup> Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2004

pada dasarnya merasa tidak mampu untuk berkembang seperti negara-negara maju. Paul Bran menyatakan bahwa pembangunan kapitalis yang berkesinambungan seperti di negara-negara maju mustahil terjadi di negara berkembang karena kualitas negara berkembang tidak sama dengan negara maju.

Dengan demikian, akhirnya negara berkembang mau tidak mau melakukan kerjasama dengan menerima globalisasi yang diyakini mampu membawa kesejahteraan bagi mereka. Negara berkembang pada umumnya mengikuti nasihat dari negara-negara maju, berusaha keras untuk ikut memodernisasikan masyarakat mereka, dan membuka diri untuk perdagangan bebas<sup>12</sup>.

Negara-negara berkembang tetap melibatkan diri dalam arus globalisasi karena sudah terlanjur terikat dan tergantung dengan hubungan ekonomi yang mereka bangun dengan negara-negara maju. Sehingga untuk dapat bertahan satu-satunya yang dapat dilakukan adalah dengan tetap terlibat dalam proses globalisasi tersebut.

Selanjutnya penulis juga menggunakan teori Neoliberalis sebagai bentuk penjelasan mengenai tindakan IMF dalam memberikan bantuan keuangan. Teori ini lahir pasca perang dingin, yang merupakan kritik terhadap neorealisme yang sebelumnya mendominasi pemikiran tentang hubungan antar Negara. Neoliberalisme muncul sebagai teori yang memfokuskan diri pada cara-cara yang mana organisasi

internasional dan aktor-aktor non Negara dapat mempromosikan kerjasama internasional.<sup>13</sup>

Prinsip utama neoliberalis menyatakan bahwa lingkungan politik dan ekonomi internasional pada dasarnya sangat terinstitusionalisasi, dimana organisasi internasional memainkan peran penting dalam hal distribusi kesejahteraan dan kekuasaan internasional. Institusi merupakan media dan alat bagi aktor-aktor politik internasional dalam melakukan kerjasama. Sama halnya dengan liberalis, fokus utama argumen neoliberalis adalah tentang optimisme terhadap kerjasama sebagai cara mencapai perdamaian dibawah sistem yang anarkis<sup>14</sup>.

Selain itu dalam hal perekonomian negara neoliberalisme bisa ditandai dengan gagasan yang lebih menekankan pada deregulasi atau peraturan pasar, campur tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka.<sup>15</sup>

### III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan tulisannya dalam bentuk penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analitis. Yaitu berusaha untuk melukiskan, menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, serta menginterpretasikan data yang kemudian dilanjutkan dengan membandingkan, meneliti serta menelaah secara jelas faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi, kondisi, dan fenomena kemudian dianalisa hubungan antara

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 167

<sup>13</sup> Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional : perspektif – perspektif klasik*, Fisip Unair, Surabaya, 2016

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Apridar, *Ekonomi Internasional (Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya)*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2009

dua variabel, dan pada akhirnya dapat menjelaskan tentang permasalahan yang diteliti.

Dalam pendeskripsian penulis menggunakan data-data yang bersifat kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik kepustakaan (*library research*) baik dari buku, jurnal, laporan, makalah, koran, website dan lain lain.

#### IV. Pembahasan

##### 4.1 Ketahanan Pangan Pakistan

Ketahanan pangan (*Food Security*) secara luas diartikan sebagai keadaan ketika semua orang, disepanjang waktu, memiliki akses fisik, social, dan ekonomi ke pangan yang mencukupi, aman, dan bergizi guna memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi makanan mereka untuk sebuah hidup yang aktif dan sehat<sup>16</sup>.

*Food and Agriculture Organization (FAO)* menyebutkan komponen utama ketahanan pangan adalah; *availability* (mencakup ketersediaan pangan secara fisik), *access* (kemudahan mendapatkan pangan untuk kebutuhan nutrisi), *utilization* (memiliki aspek sosio-biologi), *stability* (stabilitas). Selain itu menurut Bustanul Arifin ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu : ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan tersebut<sup>17</sup>.

Pakistan merupakan negara dengan ketahanan pangan yang masih rapuh. Hal ini karena indikator-indikator utama yang membentuk

ketahanan pangan belum tercapai sebagaimana semestinya. Berikut penjelasan mengenai permasalahan ketahanan pangan Pakistan.

##### 1. Ketersediaan (*Availability*)

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, Pakistan masih sangat bergantung pada produksi dalam negeri. Dimana sektor pertanian merupakan sektor paling vital bagi ketahanan pangan. Akan tetapi pada kenyataannya sektor ini masih belum dikelola dengan baik yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi. Sebagai contoh tahun 2008 sektor pertanian Pakistan hanya mengalami pertumbuhan sebanyak 1,5% sementara beberapa tahun sebelumnya tingkat pertumbuhannya adalah 4,8%<sup>18</sup>.

Semakin menurunnya pertanian Pakistan disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, dari segi total luas lahan di Pakistan yang hanya 28% digunakan untuk budidaya pertanian, sisanya terabaikan. Sebagian besar lahan ini terkonsentrasi di wilayah rural, dimiliki oleh sekelompok orang (tuan tanah), dan pengelolanya bersifat tradisioanl dilakukan oleh para petani yang bekerja secara kontrak dan bagi hasil.

Kedua adalah masalah urbanisasi. Dengan semakin terdegradasinya lahan pertanian di pedesaan ditambah sistem pengelolaan berdasarkan kontrak dan bagi hasil yang keuntungannya tidak seberapa bagi petani, banyak yang

<sup>16</sup> World Development Report, *Agriculture for Development*, The World Bank, Washington DC, 2007

<sup>17</sup> Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2004

<sup>18</sup> Hafiz Zahid Mahmood, dkk, *Education Infrastructure, Literacy and Food Security Matrix in Pakistani Punjab: A District Level Analysis*, Journal of Social Science for Policy Implications Vol. 2, No.2, American Research Institute for Policy Development, 2014

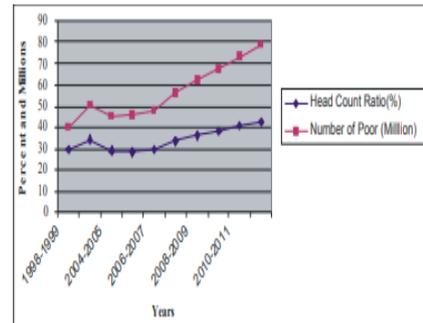
akhirnya memilih untuk melakukan urbanisasi. Bahkan Pakistan merupakan negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Asia selatan. Tingginya tingkat urbanisasi ini menyebabkan semakin berkurangnya kelompok penduduk yang mengelola pertanian disisi lain permintaan akan pangan bertambah sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk.

Berbagai masalah diatas merupakan beberapa dari banyak faktor yang menyebabkan produktifitas pertanian Pakistan semakin menurun. Sebagai contoh adalah komoditas gandum yang merupakan makanan pokok, dimana tingkat ketersediaanya menurun dari 48% di tahun 1990an menjadi 38% pada periode 2000an. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya lahan pertanian gandum<sup>19</sup>.

Selain produksi dalam negeri, untuk menghadapi meningkatnya permintaan terhadap pangan akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, Pakista juga mengandalkan pasokan pangan dari luar negeri. Terutama setelah diliberalisasinya komoditas pangan Pakistan. Sejak saat itu pasokan pangan Pakistan dari impor meningkat dimana 26 persen dari total pangan Pakistan berasal dari impor.

## 2. Akses

Dalam kasus Pakistan, salah satu indikator penting dari akses ekonomi terhadap pangan adalah jumlah poulasi yang hidup dibawah garis kemiskinan (FAO, 1998). Tingkat kemiskinan Pakistan meningkat sejak periode 1960an. Sebagaimana yang ditunjukkan gambar berikut:



Sumber: Pakistan Bureau of Stats, Economic Survey of Pakistan 2013

Meningkatnya jumlah populasi miskin menjadi salah satu tantangan utama bagi ketahanan pangan. Petani merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan paling tinggi. Hal ini karena pendapatan petani sangat rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan yang semakin lama semakin naik.

Berdasarkan data dari *World Food Program (WFP)* di tingkat rural Pakistan masyarakat dengan tingkat pendapatan paling rendah terdiri dari: 1) petani kontrak dengan pendapatan 1287.07 Rupees per kapita/bulan, 2) buruh tak berupah (yang memiliki lahan sendiri) memiliki pendapatan 1733.22 Rupees per kapita/bulan, 3) petani bagi hasil memiliki pendapatan 1815.48 Rupees per kapita/bulan. Sementara para pemilik lahan dan pekerja sosial (ahli agama) merupakan dua kategori masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi.

Rendahnya pendapatan dari pertanian salah satunya disebabkan karena sebagian besar petani bekerja menggarap lahan dengan cara menyewa (petani kontrak dan bagi hasil). Sebanyak 93 persen petani memiliki lahan kurang dari 4 hektar<sup>20</sup>. Karena itulah setiap ada kebijakan dari pemerintah dalam upaya meringankan beban pertanian tidak

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Op, cit, Michael

pernah tepat sasaran. Karena kebijakan tersebut hanya mencapai para pemilik lahan. Sementara mayoritas yang bertani adalah masyarakat yang minim lahan.

### 3. *Utilization* (Penyerapan atau pemanfaatan)

Pemanfaatan makanan berarti penyerapan makanan secara biologis yang merupakan fungsi dari perkembangan manusia. Menurut Kugelman dan Hathaway (2010), kriteria sistem pangan yang baik meliputi hal-hal berikut:

- a. Secara fisik: baik untuk nutrisi, menawarkan keamanan, dapat diakses oleh orang miskin dan nutrisi lengkap
- b. Secara sosial: harga yang efisien dan terjangkau oleh segala kelompok masyarakat, mendukung standar pendidikan yang tinggi, memungkinkan orang untuk memiliki status, martabat dan pengaruh, mempromosikan kesetaraan, mempromosikan inklusi sosial
- c. Secara lingkungan: mengurangi kerentanan, baik untuk kelestarian lingkungan, menyediakan layanan ekosistem, tidak menyebabkan degradasi lahan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Di Pakistan sendiri, pemanfaatan pangan nasional ditentukan dengan mengikuti indikator: ketersediaan air minum, fasilitas sanitasi, tingkat melek huruf dan pendidikan, dan kesetaraan gender. Secara umum Pakistan memiliki kualitas air konsumsi rendah dan fasilitas sanitasi yang buruk.

Selanjutnya, dari segi pemanfaatan makanan seperti nutrisi dan gizi, Pakistan juga dapat dikategorikan belum memiliki

gambaran yang baik. Pakistan memiliki tingkat kekurangan gizi yang tinggi, terutama wanita dan anak-anak. Sebanyak 38 persen anak-anak Pakistan memiliki berat dibawah normal usia mereka (Planning Commission and UNICEF, 2004). Sedangkan tingkat kekurangan gizi ibu rumah tangga sebanyak 21 persen (Khan, 2003).

### 4.2 *Kebijakan Ketahanan Pangan Pakistan*

Pakistan tidak pernah memiliki kebijakan yang secara spesifik mengatur ketahanan pangan nasional. Hanya mengeluarkan beberapa program ketahanan pangan di level regional. Program-program tersebut terdapat dalam kebijakan jaminan sosial berbentuk pemberian bantuan langsung serta pemberian subsidi.

Pemerintah meluncurkan berbagai subsidi untuk pertanian dan komoditas pangan baik dari segi produksi maupun akses. Gandum merupakan komoditas yang paling banyak mendapatkan subsidi. Hampir semua subsidi untuk dialokasikan untuk komoditi ini.

Dari segi produksi, subsidi-subsidi yang diberikan berupa bantuan input-input pertanian seperti penyediaan pupuk murah dan pemberian keringanan biaya penggilingan.

Untuk program bantuan langsung terdiri dari (i) *Pakistan Bait-ul-mal*, (ii) *Zakat*, (iii) *Benazir Income Support Programme (BISP)*. Selain itu juga terdapat program-program lain yang diberikan oleh berbagai lembaga internasional seperti *WFP*, *WHO*, *UNICEF* dan lain lain.

### 4.3 *Bantuan Keuangan IMF Untuk Pakistan Tahun 2008*

Kombinasi dari masalah-masalah ketahanan pangan dalam negeri menyebabkan Pakistan sangat rentan terhadap berbagai gejala krisis pangan. Hal ini terbukti ketika Pakistan mengalami krisis pangan tahun 2008 yang dipicu oleh kenaikan harga pangan yang sangat drastis. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya penurunan diberbagai sektor ekonomi lainnya terutam sektor keuangan.

Krisi tahun 2008 mengantarkan Pakistan berurusan dengan *International Monetary Fund (IMF)* dengan mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk pemulihan ekonomi negara.

Setelah melalui berbagai proes akhirnya Pakistan secara resmi menandatangani kesepakatan *Standby Arrangement (SBA)* dengan IMF untuk pendanaan sebesar 5,1685 miliar SDR (US\$ 7,6 miliar) pada 24 November 2008.

#### 4.4 Kebijakan IMF Untuk Pakistan Tahun 2008

Dalam program bantuan yang diberikan kepada Pakistan tahun 2008, IMF memberikan beberapa persyaratan kebijakan yang harus dilakukan. Secara garis besar kebijakan tersebut mengharuskan Pakistan untuk melakukan reformasi dalam perekonomiannya. Seperi terhadap sektor makro dengan melakukan devaluasi mata uang Rupee, pemotongan anggaran pemerintah terutama yang banyak digunakan di sektor sosial, privatisasi dan liberalisasi.

Berbagai kebijakan pada program ini secara rinci terdapat dalam dokumen *Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding*, berikut di antaranya:

- Memperkuat kebijakan fiskal dan keuangan untuk menurunkan inflasi, memperkuat cadangan keuangan dan menignkatkan pendapatan negara melalui penguatan pajak
- Memotong pengeluaran pemerintah di bidang sosial melalui penghapusan subsidi bagi konsumen terutama terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok
- Membuat ruang fiskal untuk investasi
- Privatisasi perusahaan Negara

#### 4.5 Pengaruh kebijakan IMF Terhadap Ketahanan Pangan Pakistan

Pada prinsipnya lembaga keuangan internasional sangat penting dan diperlukan dalam sistem internasional, karena bias menjadi promotor dalam menggiring negara-negara ke arena persaingan pasar global<sup>21</sup>.

Kebijakan yang diberikan IMF dibawah program bantuan tahun 2008 salah satunya adalah melakukan liberalisasi terhadap sektor-sektor yang masih terikat seperti pangan. Liberalisasi ini dilakukan melalui pengurangan intervensi pemerintah dalam ha proteksi serta penghapusan subsidi. Kebijakan ini memberikan

---

<sup>21</sup> SARI, Nopita, et al. Pengaruh Bantuan Inter-american Development Bank (Iadb) Dalam Programa Nacional De Electrificaciã n Sostenible Y Energã a Renovable

(Pneser) Terhadap Sektor Energi Listrik Di Nikaragua Tahun 2010. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2014, 1.2.

pengaruh terhadap melemahnya ketahanan pangan Pakistan.

Berkurangnya intervensi pemerintah berarti dalam setiap proses pengelolaan pangan seperti pengadaan, penentuan harga, perdagangan dan lain lain., pemerintah memberikan kebebasan keada siapapun baik individu maupun kelompok non pemerintah untuk melakukannya tandap adanya regulasi dan pengawasan yang ketat. Komoditi pangan harus dijalankan sesuai mekanisme pasar bebas.

Hal tersebut diatas memberikan efek yang negatif bagi ketahanan pangan Pakistan.

Peran pemerintah Pakistan yang sebelumnya merupakan pemain utama dalam pengaturan pangan dalam negeri menjadi berkurang. Dalam hal ini pengadaan atau penyediaan pihak-pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri mendapat tempat tersendiri tanpa ada hambatan berupa aturan yang sulit.

Salah satu akibatnya adalah Pakistan harus membuka keran impor terhadap produk-prduk dari luar negeri yang dijual dengan harga murah. Produk impor yang lebih murah menyebabkan produk dari petani lokal menjadi kalah saing karena konsumen akan lebih tertarik dengan yang lebih murah. Imbasnya adalah ke pendapatan petani yang akan semakin berkurang dan meningkatkan kemiskinan.

Pasca dibatasi oleh IMF, pemerintah tidak dapat lagi mensuplai pangan dengan harga yang terjangkau seperti sebelumnya. Karena mekanisme pengaturan harga pangan disesuaikan dengan harga pasar yang pada dasarnya tidak stabil dan cenderung naik. Hal ini membuat Pakistan rentan terhadap berbagai

gejolak yang terjadi di dunia, yang berhubungan dengan pangan.

Disamping berkurangnya proteksi pemerintah, disaat bersamaan sebagai implikasi dari kewajiban pemotongan pengeluaran pemerintah juga menghapus subsidi-subsidi. Seperti insentif pertanian bagi petani dan subsidi pangan murah bagi konsumen.

Dihapusnya subsidi ini, mempersulit akses masyarakat secara ekonomi terhadap pangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat Pakistan didominasi oleh masyarakat miskin dengan pendapatan kurang dari 2 Dollar per hari. Ketika terjadi kenaikan harga pangan tahun 2008, bersamaan dengan perekonomian yang semakin melemah, maka pendapatan masyarakat miskin semakin berkurang. Sementara harga pangan naik dan subsidi dicabut.

#### *4.6 Kenaikan Harga Pangan Pakistan Pasca Bantuan Tahun 2008*

Liberalisasi menyebabkan harga pangan Pakistan harus disesuaikan dengan harga internasional. Salah satu dampak dari penyesuaian harga tersebut adalah meningkatnya harga dalam negeri.

Pada Desember 2009 Indeks Harga Keseluruhan (IHK) komoditi pangan dan non-pangan naik menjadi 11% dibandingkn bulan yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini menyebabkan Pakistan mengalami inflasi harga pangan. Meskipun inflasi ini lebih rendah dari periode krisis pangan global, akan tetapi tetap menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah rumah tangga miskin dan rawan pangan.

Selanjutnya *Whole Sales Index* (WPI) keseluruhan produk pangan meningkat dari 4% pada Oktober 2008 menjadi 13% pada November 2009 dan 15% pada Desember 2010. Tidak hanya itu, WPI terhadap komoditi non-pangan seperti minyak dan listrik juga meningkat secara signifikan yaitu hampir 25% sejak Desember 2008. Peningkatan ini memperpanjang tekanan inflasi pada konsumen Pakistan.

#### 4.7 *Ketahanan Pangan Pakistan Pasca Bantuan Tahun 2008*

Dengan kondisi ketahanan pangan dalam negeri yang sudah rentan ditambah dengan kebijakan yang menekan dari IMF, ketahanan pangan Pakistan semakin berada dalam kondisi yang semakin sulit.

Keahanan pangan Pakistan berada dibawah ancaman krisis sejak tahun 2008. Terutama sekali dipicu oleh kenaikan harga pangan tingkat global yang mencapai level tertinggi sejak tahun 1970an. Menurut laporan WFP sebanyak 77 juta orang, hampir setengah dari populasi Pakistan menderita kelaparan. Jumlah ini meningkat 28 persen dari tahun sebelumnya. Lebih dari 1/3 populasi Pakistan hidup dibawah garis kemiskinan. WFP juga melaporkan pada awal tahun 2009, dari total 121 distrik di Pakistan 55 diantaranya mengalami kelaparan dan malnutrisi.

Selanjutnya laporan dari FAO tahun 2014 juga menunjukkan sekitar 39.6 juta populasi Pakistan masih mengalami kerawanan pangan. Populasi pedesaan adalah yang paling rawan dibanding perkotaan. Disebabkan oleh kemiskinan yang semakin meningkat dan semakin terbatasnya ketersediaan pangan yang dapat dijangkau. Alokasi pangan baik

ditingkat provinsi, distrik hingga rumah tangga semakin memburuk.

#### V. **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam membuat jurnal ini. Terutama sekali kepada Bapak Dr. Pazli, S.IP, M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam berbagi pemikirannya serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada lembaga Kepustakaan Universitas Riau beserta jaringannya. Terutama Lembaga perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan perpustakaan jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

#### VI. **Kesimpulan**

Pakistan adalah negara agraris dengan pertanian yang besar. Akan tetapi perkembangan pertanian Pakistan belum bisa mencapai target pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan. Berbagai kekurangan dari sisi pemberdayaan pertanian dan kebijakan pemerintah masih menjadi satu permasalahan serius. Hal tersebut menyebabkan produksi pertanian Pakistan tidak menentu dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sistem pertanian yang masih buruk ditambah dengan faktor-faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, cuaca dan iklim, kemiskinan dan penyelewengan dari sisi pemerintahan provinsi dan distrik menyebabkan Pakistan belum mencapai ketahanan pangan yang baik dan sangat rentan terhadap krisis pangan. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2008 yang juga

mengantarkan Pakistan untuk bersinggungan dengan pinjaman keuangan asing, salah satunya adalah IMF.

Kebijakan-kebijakan dari IMF dalam upaya perbaikan ekonomi disaat terjadinya krisis tahun 2008 semakin memperlemah ketahanan pangan Pakistan. Bantuan keuangan IMF disertai dengan kebijakan reformasi struktural, liberalisasi ekonomi terutama sektor pertanian hingga pangan yang akhirnya membuat dihapusnya berbagai subsidi yang sebelumnya telah disediakan pemerintah untuk menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan. Akibatnya, masyarakat miskin yang sangat bergantung pada subsidi ini menjadi semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari.

#### Referensi

- Ahmed, Meekal Aziz. 2012. *"The IMF and Pakistan: A Road to Nowhere"*. Pakistan Institute of Development Economics. Islamabad
- Andriyanto, Tri. 2012. *"Pengaruh Letter of Intent (LoI) IMF Terhadap Pelemahan Ketahanan Pangan Beras Indonesia"*. Universitas Indonesia. Depok
- Apridar. 2009. *"Ekonomi Internasional (Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya)"*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Arifin, Bustanul. 2004. *"Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia"*. Kompas. Jakarta
- Arifin, Bustanul. 2001. *"Pertanian Era Transisi"*. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung
- Burchill, Scott & Andrew Linklater. 1996. *"Teori-Teori Hubungan Internasional"*. Nusa Media. Bandung
- Deliarnov. 2006. *"Ekonomi Politik"*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Dugis, Vinsensio. 2016. *"Teori Hubungan Internasional : perspektif – perspektif klasik"*. Fisip Unair. Surabaya.
- Gilpin, Robert. 1987. *"Economic and International Politic"*. Princeton University
- Hooper, Emma. 2010. *"Pakistan's Food Crisis—Water, Energy, Agriculture & Power: The Conflict Ahead"*. Barcelona Center for International Affairs. Barcelona
- Hyder, Syed Nazre. 2012. *"IMF Stand-By Arrangement For Pakistan And Its Inconclusive End-What When Wrong?"*. Sustainable Development Policy Institute. Islamabad
- International Monetary Fund. 2001. *"Apakah Dana Moneter Internasional Itu?"*. International Monetary Fund. Washington D.C
- Kugelman, Michael & Robert M. Hathaway. 2010. *"Hunger Pains : Pakistan Food Insecurity"*. Woodrow Wilson International Center for Scholars. Washington D.C
- Masoed, Mochtar. 1990. *"Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi"*. PT.Pustaka LP3ES. Jakarta
- Maxwell, S & Frankenberger, T. 1992. *"Household Food Security Concepts, Indicators, and*

- Measurements*". Unicef and Ifad. New York
- Mrudula, E. 2006. *"International Financial Institutions: An Introduction"*. The ICFAI University Press. India
- TRDP & SC-UK. 2010. *"Food Prices Crisis in District Tharparkar : A Rapid Assesment"*. Thardeep Rural Development Programme. Tharparkar
- Ahmad, Munir & Umar Farooq. 2010. *"The State of Food Security in Pakistan : Future Challenges and Coping Strategies"*. The Pakistan Development Review 49:4 Part II pp. 903–923
- Ahmed, Khalil, dkk. 2016. *"The Role of IMF In Pakistan Economy"*. Bulletin of Business and Economics, 5(3), 126-134, Research Foundation For Humanity, <http://rfh.org.pk/jur/magazine-category/bbe>
- Anwar, Mumtaz. 2006. *"The Political Economy of International Financial Institution Lending to Pakistan"*. Pakistan Economic and Social Review Journal Vol.44 no.2
- Arshad, Sana & Adila Shafqat. 2012. *"Food Security Indicators, Distribution and Techniques for Agriculture Sustainability in Pakistan"*. International Journal of Applied Science and Technology Vol. 2 No. 5
- Baloch, Muhammad Saad, dkk. 2014. *"Influence of International Monetary Fund (IMF) for Pakistan Taxation"*. Pakistan Institute of Development Economics Journal, <https://www.researchgate.net/publication/269764866>
- Bashir, Muhammad Khalid & Steven Schilizzi. 2012. *"Have Policies in Pakistan Been Effective for Improving Food Security? Wanted: Disaggregated Policy Assessment!"*. World Applied Sciences Journal 17 (9): 1182-1191. University of Agriculture Pakistan
- Cheema, Ahmed Raza & Zafar Abbas. 2016. *"Determinants of Food Insecurity In Pakistan: Evidence from PSLM 2010-11"*. Pakistan Journal of Applied Economics, Vol.26 No.2, (183-213)
- Dorosh, Paul & Abdul Salam. 2008. *"Wheat Markets and Price Stabilisation in Pakistan: An Analysis of Policy Options"*. Jurnal The Pakistan Development Review Vol 47: 1 (Spring 2008) pp. 71–87
- Hasan, Ibrar, dkk. 2013. *"Impact of Imf Programme on Sacrifice Ratio in Pakistan"*. World Applied Sciences Journal 23 (9): 1135-1139
- Hoddinott, J, *Operationalizing Household Food Security In Development Projects:an Introduction*, International Food Policy Research Institute Technical Guide No.1, Washington, D.C, 1999
- Khan, Rana Ejaz Ali, dkk. 2011. *"Impact Evaluation of Structural Adjustment Program : A Case of Pakistan"*. European Journal of Economics, Finance and

SARI, Nopita, et al. Pengaruh Bantuan Inter-american Development Bank (Iadb) Dalam Programa Nacional De Electrificaciã n Sostenible Y Energã a Renovable (Pneser) Terhadap Sektor Energi Listrik Di Nikaragua Tahun 2010. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2014, 1.2.

FAO/WFP/IFAD Presentation to UNCT. “*Current Food Crisis and Soaring Prices in Pakistan*”. In-Slideshare.  
<https://www.slideshare.net/aghaimranhamid/joint-presentation-food-crisis-in-pakistan-april-08>, diakses pada 27 April 2018

Hussain, Zakir & Waqar Akram. 2008. “*Persistent Food Insecurity from Policy Failures in Pakistan*”. The Pakistan Development Review  
<https://www.researchgate.net/publication/46532477>, diakses pada 27 Agustus 2018

World Development Report. 2007. “*Agriculture for Development*”. The World Bank. Washington DC.

Ayaz Ali Soomro. 2015. “*Food Security : A Global and National Perspective*”. Report Pakistan Fisherfolk For